

STUDI KUALITATIF ANGKA PARTISIPASI KASAR SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS (APK SLTA) BERMASALAH DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nyayu Khodijah

Universitas IAIN Raden Fatah
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Km.3,5 Palembang
Telp. (0711) 354668 Email: nyayu_dd@yahoo.com

Diterima :16/10/2014

Direvisi: 14/12/2014

Disetujui : 31/12/2014

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran empirik tentang faktor penyebab belum maksimalnya pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTA di Propinsi Sumatera Selatan pasca diterapkannya Program Sekolah Gratis. Penelitian dilakukan di tiga Kota/Kabupaten yang meliputi Palembang, Banyuasin, dan OKU Selatan dengan pertimbangan merupakan representasi daerah yang memiliki APK SLTA rendah dari wilayah perkotaan dan pedesaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Responden penelitiannya adalah anak-anak yang tidak melanjutkan ke SLTA, orang tua, dan masyarakat setempat. Teknik pengumpulan datanya meliputi wawancara mendalam, focus group discussion, observasi, dan studi dokumentasi, sedangkan teknik analisis datanya meliputi: reduksi data, penyajian data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Belum maksimalnya pencapaian APK SLTA di Sumatera Selatan disebabkan oleh banyak faktor yang berbeda-beda, meliputi status sosial ekonomi, budaya, daya tampung sekolah, dan lingkungan; 2) Faktor status sosial ekonomi menjadi penyebab utama belum maksimalnya pencapaian APK SLTA, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan, dan 3) Faktor lain yang juga menjadi penyebab belum maksimalnya pencapaian APK SLTA namun hanya ada di sebagian wilayah adalah geografis dan kemampuan anak.

Kata Kunci: APK, SLTA, Sumatera Selatan

QUALITATIVE STUDY ON SENIOR HIGH SCHOOL GROSS ENROLLMENT RATE PROBLEM IN SOUTH SUMATRA

ABSTRACT

The aim of this study was to obtain empirical description of the factors causing not maximal achievement of the senior high school Gross Enrolment Ratio (GER) in South Sumatra after implementation of Free Schools Program. The study was conducted in three Cities/Counties which include Palembang, Banyuasin, and South OKU with consideration represents the area that has a low senior high school GER from urban and rural areas. The study used a qualitative approach with case study design. Respondents of this research are children who do not go on to high school, parents, and local communities. Data collection techniques include in-depth interviews, focus group discussions, observation, and documentation, while data analysis techniques include: data reduction, display data, interpretation, and conclusion. The results showed that: 1) Not maximal achievement of senior high school GER in South Sumatra caused by many different factors, including socioeconomic status, culture, school capacity, environmental factors; 2) Factor of socio-economic status is a major cause not maximal achievement of senior high school GER, both in urban and rural areas, and 3) Other factors that also be the cause of not maximal achievement of senior high school GER, but only in some areas are geographic and ability of the child

Keywords: senior high school, GER, South Sumatra

PENDAHULUAN

Diakui bahwa kualitas suatu bangsa dan negara sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya, dan kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan yang diselenggarakan. Dengan kata lain, pendidikan merupakan suatu proses atau sistem yang dianggap dapat mengantarkan suatu bangsa dan negara pada pencapaian kualitas sumber daya manusia yang diinginkan.

Salah satu ukuran kualitas pendidikan yang sering digunakan adalah Indeks Pembangunan Pendidikan Untuk Semua atau *education for all* (EFA). Data EFA tahun 2011 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Pendidikan di Indonesia berada di peringkat 69 dari 127 negara, merosot dibandingkan tahun 2010 yang berada pada posisi 65. Indeks yang dikeluarkan oleh UNESCO ini lebih rendah dibandingkan Brunei Darussalam (34), serta terpaut empat peringkat dari Malaysia (65).

Ada banyak penyebab rendahnya indeks pembangunan pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah rendahnya tingkat partisipasi penduduk usia sekolah di semua jenjang pendidikan. Indikator yang paling

sederhana untuk mengukur tingkat partisipasi tersebut adalah angka partisipasi kasar (APK). APK adalah rasio jumlah siswa berapa pun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk dengan kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK akan rendah jika jumlah siswa yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk dengan kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Sebaliknya APK akan tinggi jika jumlah siswa yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk dengan kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

Data BPS Tahun 2013 menunjukkan bahwa secara nasional APK jenjang SLTA di Indonesia adalah 68,67%. Angka ini masih relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, seperti Singapura dan Jepang yang telah mencapai tingkat APK 100 persen atau Thailand dan China yang telah mencapai tingkat APK di atas 70 persen. APK SLTA tersebut juga jauh lebih rendah dibandingkan dengan APK SLTP yang mencapai 89,47% maupun APK SD yang telah

mencapai 104,24%. Di Sumsel sendiri, APK SLTA adalah 69,41%, juga jauh lebih rendah dibandingkan dengan APK SLTP sebesar 86,93% maupun APK SD sebesar 106,08%⁽¹⁾.

Berdasarkan data di atas, nampaklah bahwa APK SLTA baik pada level nasional maupun propinsi Sumatera Selatan selalu lebih rendah dibandingkan dengan APK pada jenjang sekolah di bawahnya, yaitu SD dan SLTP. Keadaan ini harus segera diatasi guna meningkatkan indeks pembangunan pendidikan.

Untuk mengatasi masalah rendahnya APK SLTA, Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan dan program, baik dari sisi pembiayaan atau dana dan sisi ketersediaan sekolah. Dari sisi pembiayaan atau dana, Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan sejak tahun 2009 mencanangkan Program Sekolah Gratis. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahun 2011 oleh tim peneliti Universitas Indonesia yang dipimpin oleh Ninasapti Triaswati, SE, MSc., Ph.D., program sekolah gratis di Sumatera Selatan telah dapat meningkatkan perluasan akses pendidikan, termasuk salah satunya adalah peningkatan APK.

Meski demikian, kenyataan di lapangan masih menunjukkan APK SLTA di Sumatera Selatan belum sepenuhnya sesuai harapan, bahkan di beberapa Kota/Kabupaten terindikasi sangat rendah. Berdasarkan data BPS tahun 2010, ada 8 (delapan) Kota/Kabupaten yang memiliki APK SLTA dibawah APK propinsi (61,27%), yaitu Ogan Ilir (60,42%), Empat Lawang (55,01%), OKI (53,95%), Musi Banyuasin (49,76%), OKU Timur (44,73%), Banyuasin (41,84%), OKU Selatan (37,74%), dan Musi Rawas (35,73%)⁽²⁾.

Rendahnya APK SLTA terjadi karena jumlah siswa yang sedang sekolah pada jenjang SLTA jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk pada kelompok usia 16 – 18 tahun. Artinya, rendahnya APK SLTA diakibatkan oleh banyaknya anak usia 16 – 18 tahun yang tidak melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang SLTA.

Banyak faktor diduga menjadi penyebab tidak melanjutkan sekolah. Data Sussenas menunjukkan bahwa alasan untuk tidak bersekolah anak usia 7-18 tahun di perkotaan dan pedesaan meliputi: faktor ekonomi, takut bersekolah, bekerja, menikah, tidak diterima masuk sekolah, jarak sekolah, merasa cukup dengan

pendidikan terakhir, cacat, dan lain-lain⁽³⁾. Penelitian yang dilakukan Lembaga Penelitian SMERU di Kabupaten Pontianak, Tangerang, Sleman, dan Lombok Timur, menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan seorang anak didik putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah antara lain adalah: 1) mekanisme institusi pendidikan; 2) tingkat perekonomian rumah tangga; 3) aspek geografis; 4) ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan; 5) ketersediaan peluang kerja untuk anak usia sekolah atau dibawah usia kerja, serta 6) kondisi sosial ekonomi serta nilai-nilai tradisi setempat ⁽⁴⁾. Secara khusus, faktor penyebab rendahnya APK SLTA menurut Michael P. Todaro, diantaranya adalah tingginya biaya yang dibebankan pada orang tua, yaitu berupa biaya-biaya langsung individual (ongkos, buku, uang seragam, dan lain-lain) dan biaya-biaya yang tidak langsung. Dalam biaya tidak langsung seorang anak yang sudah mencapai umur di mana sudah dapat memberikan sumbangan kepada penghasilan keluarga akan memilih untuk bekerja dari pada untuk memperoleh pendidikan. Hal ini sangat berkaitan dengan masih rendahnya pendapatan atau penghasilan keluarga. Tidak bisa

dipungkiri bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan akan semakin besar biaya pendidikan yang akan dikeluarkan⁽⁵⁾.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa faktor penyebab rendahnya APK SLTA secara umum dapat dikategorikan menjadi dua faktor, yaitu: faktor internal yang meliputi faktor kemampuan baik kemampuan fisik maupun kemampuan intelektual dan faktor eksternal yang meliputi faktor status sosial ekonomi, faktor budaya, dan faktor geografis.

Khusus mengenai faktor eksternal, dari segi status sosial ekonomi orang tua siswa, data BPS menyebutkan bahwa pada Maret 2011, terdapat 30,02 juta orang miskin. Bahkan, Bagian Perencanaan dan Penganggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kemendiknas mengungkapkan, pada tahun 2011 jumlah siswa miskin di Indonesia hampir mencapai 50 juta. Jumlah tersebut terdiri dari 27,7 juta siswa di bangku tingkat SD, 10 juta siswa tingkat SMP, dan 7 juta siswa setingkat SMA. Dari jumlah itu, sedikitnya ada sekitar 2,7 juta siswa tingkat SD dan 2 juta siswa setingkat SMP yang terancam putus sekolah⁽⁶⁾.

Dari segi budaya, saat ini masih banyak orang tua yang kesadarannya akan arti penting pendidikan masih rendah, serta masih ada orang tua yang memiliki pandangan yang kurang tepat tentang kesetaraan gender dalam pendidikan. Beberapa tradisi seperti adanya kebiasaan kawin di usia muda (suku Madura), kebiasaan kawin lari (merari) atau kawin cerai (di Lombok), atau pemaksaan kawin muda oleh orang tua (di Sleman Yogyakarta) menjadi salah satu penyebab rendahnya APK SLTA.

Dari segi geografis, saat ini masih banyak anak usia sekolah yang tidak mengenyam pendidikan karena lokasi tempat tinggalnya berada di daerah terpencil. Mereka hidup di satuan wilayah terbelakang, pulau-pulau kecil, dan daerah perbatasan, sehingga mereka mengalami kesulitan mengakses sekolah dikarenakan jarak rumah dengan sekolah yang terlalu jauh atau tidak adanya sarana transportasi menuju sekolah.

Disamping ketiga faktor eksternal di atas, faktor lain yang diduga juga mempengaruhi rendahnya APK SLTA adalah ketersediaan fasilitas (daya tampung sekolah). Dari data jumlah sekolah yang ada di seluruh wilayah di Indonesia termasuk propinsi Sumatera

Selatan, jumlah SLTA (SMA/SMK/MA) yang ada cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah SMP/MTs maupun SD/MI.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran empirik tentang faktor penyebab belum maksimalnya pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTA di Propinsi Sumatera Selatan pasca diterapkannya Program Sekolah Gratis.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Penelitian dilakukan di tiga Kota/Kabupaten di Propinsi Sumatera Selatan yang meliputi: Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, dan Kabupaten OKU Selatan dengan pertimbangan merupakan representasi daerah yang memiliki APK SLTA rendah dari wilayah perkotaan dan pedesaan.

Responden penelitiannya adalah anak-anak yang tidak melanjutkan ke SLTA, orang tua, dan masyarakat setempat. Mengingat tidak adanya data pasti tentang jumlah anak yang tidak melanjutkan ke SLTA, maka pengambilan sampel responden dilakukan secara insidental, artinya responden yang dapat ditemui itulah

yang menjadi sampel. Penentuan sampel responden dilakukan dengan bantuan informan kunci (*key informant*) yang meliputi: a) Dinas Pendidikan Kabupaten dan UPTD Pendidikan Kecamatan, b) kepala SMP dan para guru setempat, serta c) tokoh masyarakat setempat, seperti Lurah/Kades, Ketua Rt, Ketua Rw, dan tokoh masyarakat lainnya yang diduga dapat memberikan informasi tentang keberadaan anak-anak usia sekolah yang tidak melanjutkan ke SLTA.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam (*indept interview*), *focus group discussion (FGD)*, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk mengumpulkan data berbagai permasalahan yang menjadi penyebab belum maksimalnya pencapaian APK SLTA. *FGD* digunakan untuk triangulasi data tentang faktor penyebab belum maksimalnya pencapaian APK SLTA yang terkumpul melalui wawancara. Observasi digunakan untuk mengumpulkan data

tentang kondisi riil permasalahan yang menjadi penyebab belum maksimalnya pencapaian APK SLTA yang dapat diamati langsung oleh peneliti, seperti: kondisi tempat tinggal dan letak sekolah/aksesibilitas.

Studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pendukung berupa dokumen dari Biro Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten.

Teknik analisis data yang dipergunakan meliputi 4 tahap, yaitu: reduksi data, penyajian data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL

Kota Palembang

Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTA

Hasil penelusuran dokumen di Kantor BPS Kota Palembang hanya diperoleh data Angka Partisipasi Murni (APM) anak usia 16 – 18 tahun, di mana pada tahun 2011 terjadi peningkatan yang signifikan APM baik laki-laki maupun perempuan dibandingkan tahun 2010⁽⁷⁾. Gambaran selengkapnya tentang hal ini dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1.
Angka Partisipasi Murni Kota Palembang Tahun 2010-2011

No.	Usia	APM	
		2010	2011
1.	7 – 12 tahun	Laki-laki : 96,06 Perempuan: 85,20	Laki-laki : 99,06 Perempuan: 98,43

2.	13 – 15 tahun	Laki-laki : 82,49 Perempuan: 82,65	Laki-laki : 85,56 Perempuan: 92,00
3.	16 – 18 tahun	Laki-laki : 59,09 Perempuan: 46,82	Laki-laki : 74,11 Perempuan: 69,67

Sumber: Statistik Daerah Kota Palembang 2012 (BPS, 2012)

Data BPS di atas sangat jauh berbeda dengan data yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang, di mana diperoleh data APM SLTA sebesar 94,44. Selain itu juga diperoleh data Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTA Kota Palembang sebesar 98,22⁽⁸⁾. Akan tetapi, tidak diketahui secara pasti APK SLTA setiap kecamatan. Namun berdasarkan informasi yang diperoleh dari Disdikpora Kota Palembang, salah satu kecamatan yang jumlah anak tidak melanjutkan ke SLTA cukup banyak adalah kecamatan Alang-alang Lebar. Karena itu penelitian ini difokuskan pada kecamatan Alang-alang Lebar. Kecamatan Alang-Alang Lebar merupakan Kecamatan Pemekaran yang telah dibentuk pada tanggal 11 Agustus 2007. Kecamatan Alang-Alang Lebar terletak di kawasan pengembangan Kota Palembang dengan Luas Wilayah 1.886,95 Ha ⁽⁹⁾.

Profil Orang Tua dari Anak yang Tidak Melanjutkan ke SLTA

Sebagian besar orang tua dari anak yang tidak melanjutkan ke SLTA

di kecamatan Alang-alang Lebar berasal dari golongan menengah ke bawah. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan faktor utama penyebab anak tidak melanjutkan ke SLTA. Kemiskinan dalam hal ini dapat dilihat dari rendahnya tingkat pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, dan juga penghasilan orang tua.

Dilihat dari tingkat pendidikan, hasil wawancara dengan beberapa orang tua dan anak yang tidak melanjutkan ke SLTA di kecamatan Alang-alang Lebar menunjukkan bahwa sebagian orang tua berasal dari kalangan masyarakat yang berpendidikan rendah, yaitu SLTA ke bawah, bahkan ada orang tua yang tidak tamat SD. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan orang tua kurang menyadari arti penting pendidikan bagi putra-putri mereka. Ketika ditanya mengapa putra putri mereka tidak melanjutkan ke SLTA, alasan yang disampaikan adalah karena putra putri mereka sendiri yang kurang berminat untuk melanjutkan pendidikan. Pendidikan yang rendah menyebabkan orang tua hanya dapat

pasrah saja tatkala putra putri mereka tidak berkeinginan untuk melanjutkan. Hal ini sesuai dengan hasil *Focus Group Discussion* dengan para tokoh masyarakat di Rt. 22 Kelurahan Srijaya pada tanggal 8 Mei 2013 yang menunjukkan bahwa sebagian besar anak-anak yang tidak melanjutkan ke SLTA memiliki orang tua dengan tingkat pendidikan yang rendah.

Dilihat dari pekerjaan sebagian besar orang tua dari anak-anak yang tidak melanjutkan ke SLTA memiliki pekerjaan yang tidak tetap, seperti pedagang kecil atau buruh bangunan. Hasil *Focus Group Discussion* dengan para tokoh masyarakat di Rt. 22 Kelurahan Srijaya pada tanggal 8 Mei 2013 menunjukkan bahwa orang tua dari anak-anak yang tidak melanjutkan ke SLTA kebanyakan bekerja tidak tetap seperti buruh bangunan dan pedagang kecil di pasar. Pekerjaan yang tidak menetap berakibat pada penghasilan mereka juga tidak tetap. Karena itu, setiap harinya orang tua selalu disibukkan dengan upaya mencari penghasilan guna memenuhi kebutuhan keluarga dan mengabaikan perhatian pada pendidikan anak-anak mereka.

Namun kemiskinan bukanlah satu-satunya faktor, karena tidak semua

orang tua dari anak-anak yang tidak melanjutkan ke SLTA berasal dari keluarga yang dapat dikatakan miskin. Hal ini nampak dari kondisi tempat tinggal dan kepemilikan harta benda mereka. Bahkan ada orang tua yang memiliki rumah tempat tinggal yang tergolong mewah dilengkapi dengan AC dan barang mewah lainnya serta adanya kepemilikan mobil dan sepeda motor dalam garasi rumah mereka. Untuk kasus ini, dapat diduga bahwa faktor penyebab anak mereka tidak melanjutkan pendidikan ke SLTA bukanlah faktor kemiskinan, namun lebih disebabkan oleh faktor budaya, terutama rendahnya kesadaran orang tua akan arti penting pendidikan. Hal ini nampak dari hasil wawancara dengan orang tua yang bersangkutan bahwa mereka tidak berbuat apa-apa ketika anak mereka menyatakan tidak berkeinginan lagi melanjutkan sekolah. Tidak berbuatya orang tua menunjukkan bahwa kesadaran orang tua akan arti penting pendidikan termasuk rendah. Hal ini diperkuat oleh informasi dari para tetangga bahwa orang tua tersebut cenderung kurang peduli pada pendidikan anak mereka dan kurang peduli apakah anaknya bersekolah atau tidak.

Profil Anak yang Tidak Melanjutkan ke SLTA

Sebagian besar anak yang tidak melanjutkan ke SLTA berasal dari keluarga miskin. Sebagai contoh Andi (bukan nama sebenarnya) yang berusia 17 tahun. Andi tidak melanjutkan ke SLTA dengan alasan orang tua tidak punya biaya. Ayah Andi tidak tamat SD dan bekerja sebagai buruh serabutan dengan penghasilan yang tidak seberapa. Andi adalah anak bungsu dari tiga bersaudara dan seperti kakak-kakaknya yang lain, Andi hanya bersekolah hingga SMP karena orang tua tidak mampu membiayai. Hasil *Focus Group Discussion* dengan para tokoh masyarakat menunjukkan bahwa memang beratnya beban orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka sangat dirasakan di awal masuk sekolah. Meski Pemerintah telah melaksanakan program sekolah gratis namun masih ada beberapa sekolah (terutama sekolah swasta) yang mengenakan pembayaran uang pangkal dalam jumlah yang tidak kecil hingga ada yang mencapai lima juta rupiah. Hal ini menyebabkan masyarakat masih bertanya tentang kejelasan “batasan” sekolah gratis bagi mereka.

Selain faktor kemiskinan, menurut para tetangga sebenarnya Andi sendiri

juga merasa kurang mampu mengikuti pelajaran di SLTA yang dianggap “berat”. Saat ini Andi banyak menghabiskan waktunya dengan bermain-main atau sesekali ikut ayahnya menjadi buruh bangunan. Memang ada keinginan orang tua agar Andi dapat melanjutkan lagi sekolahnya. Akan tetapi justru Andi sudah tidak ingin lagi bersekolah karena merasa dapat memperoleh uang sendiri dan membeli keperluan pribadi sendiri dengan uang tersebut tanpa harus meminta pada orang tua yang belum tentu akan selalu memberi.

Lain halnya dengan Ani (bukan nama sebenarnya) yang berusia 16 tahun. Ayah Ani hanyalah buruh bangunan dan Ani adalah anak kedua dari sembilan bersaudara. Penghasilan yang kecil dengan jumlah anak yang banyak membuat orang tua Ani tidak mampu membiayai sekolah anak-anak mereka. Ani saat ini ikut kakaknya bekerja sebagai buruh pabrik di Jakarta. Menurut tetangga, sebenarnya Ani sempat melanjutkan ke salah satu SLTA swasta. Akan tetapi karena orang tua sudah tidak mampu lagi membiayai dan Ani sendiri merasa malu karena sering terlambat membayar iuran sekolah akhirnya membuat Ani memutuskan untuk berhenti sekolah

dan bekerja seperti kakaknya. Menurut orang tua, seandainya saja Ani dapat diterima di sekolah negeri dengan biaya yang relatif lebih murah tentu Ani tidak sampai berhenti sekolah.

Dua kasus di atas menunjukkan bahwa sebagian besar anak yang tidak melanjutkan ke SLTA di kelurahan Srijaya ini adalah berasal dari keluarga miskin. Hasil FGD dengan para tokoh masyarakat di Rt. 22 kelurahan Srijaya menunjukkan bahwa memang sebagian besar masyarakat di Rt ini merupakan masyarakat yang tergolong kurang mampu. Akan tetapi, kemiskinan bukan merupakan faktor tunggal penyebab tidak melanjutkan. Faktor lain yang juga turut mempengaruhi adalah faktor internal anak. Faktor internal anak yang menjadi penyebab tidak melanjutkan ke SLTA dalam hal ini adalah rendahnya motivasi dan kemampuan intelektual anak akibat asupan gizi yang kurang memadai.

Selain itu, faktor lain yang juga turut menjadi penyebab tidak melanjutkan ke SLTA adalah keterbatasan akses ke sekolah negeri. Hasil FGD dengan para tokoh masyarakat di Rt. 23 menunjukkan bahwa terbatasnya akses ke sekolah negeri menyebabkan masyarakat tidak

dapat menikmati program sekolah gratis yang dilaksanakan pemerintah.

Meski kemiskinan dianggap sebagai faktor utama penyebab tidak melanjutkan ke SLTA, tapi ternyata tidak semua kasus anak yang tidak melanjutkan ke SLTA di Kelurahan Srijaya ini disebabkan oleh kemiskinan. Contohnya Budi (bukan nama sebenarnya) yang berusia 17 tahun. Budi tidak melanjutkan ke SLTA bukan karena orang tuanya miskin. Orang tua Budi adalah seorang “mandor” perkebunan kelapa sawit di Musi Banyuasin. Menurut tetangganya, Budi dan keluarga pindah dari Musi Banyuasin ketika Budi masih bersekolah SD. Keluarga Budi termasuk salah satu keluarga yang terkategori cukup mampu di lingkungannya. Namun kehidupan keluarga yang berkecukupan ternyata tidak dibarengi dengan keharmonisan hubungan yang terjalin antar anggota keluarga. Ayah Budi lebih banyak di perkebunan dan pernah berselingkuh, sehingga membuat ibunya mengalami stress. Dalam kondisi yang demikian membuat Andi kurang mendapat perhatian dari kedua orang tuanya. Merasa kurang bahagia di rumah membuat Budi mencari kebahagiaannya sendiri di luar rumah.

Akhirnya kondisi lingkungan sosial yang buruk menyebabkan Budi tidak melanjutkan ke SLTA bahkan terjerumus pada narkoba. Seperti halnya Andi, saat ini Budi banyak menghabiskan waktunya untuk bermain-main saja tanpa masa depan yang jelas.

Kabupaten Banyuasin

APK SLTA

Dari Kantor BPS maupun Kantor Dinas Pendidikan, tidak diperoleh data pasti tentang APK SLTA Kabupaten Banyuasin. Namun dilihat dari data BPS Kabupaten Banyuasin tahun 2012, jumlah siswa SLTA adalah 17.337 siswa, sedangkan jumlah anak usia 16-18 tahun adalah 41.980 orang⁽¹⁰⁾. Sehingga APK SLTA dapat dihitung: $17.337 : 41.980 \times 100 = 41,30$. Dengan demikian, diduga APK SLTA Kabupaten Banyuasin adalah 41,30.

Selain itu, juga tidak diketahui secara pasti APK SLTA setiap kecamatan. Namun berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin, salah satu kecamatan yang jumlah anak tidak melanjutkan ke SLTA cukup banyak adalah kecamatan Muara Padang. Karena itu penelitian ini difokuskan pada kecamatan Muara

Padang. Secara geografis, sebagian besar wilayah kecamatan Muara Padang terdiri dari dataran rendah, hutan rawa, dan terdapat sungai buatan yang memisahkan antar desa. Ketinggian wilayah berkisar antara 1000-1500 meter di atas permukaan laut. Dilihat dari kondisi demografi, di kecamatan ini terdapat beraneka ragam suku dan budaya, seperti suku Jawa, Sunda, Bugis, Madura, dan Sumatera yang pada umumnya adalah transmigrasi dari pulau Jawa.

Profil Orang Tua dari Anak yang Tidak Melanjutkan ke SLTA

Sebagian besar orang tua dari anak yang tidak melanjutkan ke SLTA di kecamatan Muara Padang hanya berpendidikan SD, bahkan sebagian ada yang tidak tamat SD. Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan mereka tidak mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk meningkatkan taraf hidup mereka lebih baik lagi. Karena itu sebagian dari mereka sulit keluar dari kungkungan kemiskinan.

Akan tetapi, tidak semua orang tua dari anak yang tidak melanjutkan ke SLTA berasal dari keluarga miskin. Hal ini terlihat dari kondisi tempat tinggal dan kepemilikan harta mereka.

Sebagian dari mereka memiliki rumah cukup layak untuk ukuran masyarakat kecamatan Muara Padang dan mereka juga memiliki lahan perkebunan sendiri yang cukup luas, yaitu perkebunan karet dan kelapa sawit. Karenanya dapat dikatakan bahwa sebenarnya mereka mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka hingga jenjang SLTA. Namun tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan mereka cenderung memandang masa depan secara pragmatis, tidak prospektif. Sehingga ketika anak-anak mereka menyatakan tidak mau lagi melanjutkan ke SLTA dan memilih bekerja sebagai *baby sitter*, pembantu rumah tangga, atau buruh tani dengan gaji kurang dari 1 juta per bulan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak mampu memberikan kesadaran pada anak-anak mereka akan arti penting pendidikan bagi masa depan mereka.

Hasil FGD dengan para tokoh masyarakat Desa Air Gading diakui bahwa tingkat pendidikan orang tua yang rendah menyebabkan rendahnya kesadaran mereka akan arti penting pendidikan, sehingga mereka tidak mampu memotivasi anak-anak mereka untuk melanjutkan pendidikan.

Profil Anak yang Tidak Melanjutkan ke SLTA

Sebagian besar anak yang tidak melanjutkan ke SLTA di kecamatan Muara Padang berasal dari keluarga miskin. Sebagai contoh Intan (bukan nama sebenarnya) yang berusia 16 tahun. Intan adalah anak bungsu dari 2 bersaudara. Orang tua Intan tidak tamat SD. Orang tua Intan sebenarnya memiliki sawah seluas 2,5 hektar dan kebun sawit seluas 2 hektar, namun hasil panen sawahnya tidak menentu mengingat sistem perairan di desanya kurang baik sehingga dalam 1 tahun maksimal hanya bisa panen 2 kali, itupun kalau tidak dirusak oleh hama. Sedangkan kebun sawit yang dimiliki belum menghasilkan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya, selain bertani ayah Intan juga adalah tukang bangunan jika ada yang meminta. Menurut gurunya, Intan sebenarnya termasuk anak yang cerdas dan sering mendapat rangking ketika di SMP. Orang tua Intan sebenarnya berkeinginan anaknya melanjutkan ke SMA tetapi mereka tidak melakukan apa-apa saat anaknya memilih untuk tidak melanjutkan ke SLTA. Orang tua berdalih kasihan kalau anaknya harus menempuh jalan yang jauh menuju sekolah dalam kondisi jalan yang sangat rusak. Hasil FGD dengan beberapa tokoh

masyarakat Desa Air Gading diketahui bahwa memang satu-satunya SMA di kecamatan Muara Padang berada di Jalur 20. Jika kondisi jalan kering, untuk mencapai ke sana para siswa harus melewati jalan tanah berlumpur dengan waktu tempuh \pm 1 jam dengan sepeda. Namun jika hujan dan kondisi jalan rusak maka waktu tempuh bisa mencapai 2 jam atau lebih. Selain itu, pakaian siswa bisa kotor sekali karena kemungkinan jatuh sangat besar. Karena itu, jika musim hujan para siswa lebih memilih untuk tidak bersekolah.

Sebenarnya Intan dapat melanjutkan sekolah jika saja orang tuanya mampu membayar biaya kos dan mengirim uang makan bulanan pada anaknya. Akan tetapi orang tua Intan bukan orang yang mampu. Akhirnya karena dipengaruhi oleh teman-temannya dan kakaknya yang juga pernah bekerja sebagai *baby sitter* Intan lebih memilih bekerja sebagai *baby sitter* di Palembang dengan penghasilan \pm 800 ribu per bulan. Hasil wawancara dengan beberapa tokoh juga menunjukkan bahwa memang banyak anak-anak perempuan di desa Air Gading memilih tidak melanjutkan ke SLTA dan bekerja menjadi *baby sitter* di Palembang. Namun pekerjaan tersebut bukan menjadi pilihan jalan

yang akan ditempuh sepanjang hidup, tetapi dianggap sebagai pekerjaan sementara untuk mengumpulkan uang sebelum akhirnya kembali dan menikah dengan pemuda di desanya. Biasanya mereka hanya akan bekerja antara 2- 3 tahun, lalu pulang dan menikah.

Dari kasus di atas, nampaklah bahwa kemiskinan merupakan salah satu faktor penyebab anak-anak di desa ini yang tidak melanjutkan ke SLTA. Hasil FGD menunjukkan bahwa memang sebagian besar masyarakat tergolong kurang mampu untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka hingga ke jenjang yang tinggi.

Namun kemiskinan bukan menjadi penyebab tunggal anak-anak tidak melanjutkan ke SLTA. Hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat menunjukkan bahwa banyak juga keluarga yang tergolong miskin yang mampu menyekolahkan anak-anak mereka hingga ke jenjang SLTA. Banyak juga anak-anak dari keluarga mampu tidak melanjutkan karena faktor letak sekolah yang jauh, jalan menuju sekolah yang rusak berat, dan daya tampung sekolah yang terbatas.

Contohnya Iwan (bukan nama sebenarnya) yang berusia 17 tahun. Iwan adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Orang tua Iwan tidak tamat

SD akan tetapi mereka adalah keluarga yang cukup mampu dilihat dari kepemilikan sawah yang tergolong luas (4 hektar) dan perkebunan karet yang sudah menghasilkan. Iwan tamat SMP tahun lalu dan tidak mau melanjutkan ke SLTA dengan alasan letak sekolahnya sangat jauh dan jalan menuju sekolah sangat jelek. Seperti halnya orang tua Intan, orang tua Iwan juga tidak berbuat apa-apa saat anak mereka memilih untuk tidak melanjutkan ke SLTA. Saat ini Iwan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bermain atau sesekali ikut menyadap karet di kebun orang tuanya dengan penghasilan 200 ribu per minggu.

Meski memang kebanyakan anak tidak melanjutkan ke SLTA dikarenakan letak sekolah yang jauh dan kondisi jalan yang rusak. Namun bagi sebagian anak laki-laki, hal tersebut tidak terlalu menjadi persoalan seandainya daya tampung sekolah memadai. Contohnya Agus (bukan nama sebenarnya) yang berusia 16 tahun. Agus adalah anak bungsu dari 2 bersaudara. Sebagai laki-laki ia sanggup menjalani bersekolah jauh dengan bersepeda melewati jalan yang rusak berat, akan tetapi ia tidak diterima di satu-satunya SMA negeri terdekat karena

keterbatasan daya tampung sekolah. Orang tua Agus juga sudah berusaha supaya anak mereka tetap melanjutkan pendidikan, karena itu Agus dimasukkan ke pondok pesantren. Namun baru 2 bulan Agus pulang dan memutuskan untuk berhenti sekolah dengan alasan tidak betah. Seperti halnya Iwan, Agus saat ini lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bermain atau sesekali ikut menyadap karet di kebun orang tuanya.

Dua kasus di atas menunjukkan bahwa faktor lain sebagai penyebab anak tidak melanjutkan ke SLTA adalah faktor geografis dan daya tampung sekolah negeri. Hasil FGD menunjukkan bahwa memang satu-satunya SLTA negeri di kecamatan Muara Padang adalah SMAN Muara Padang yang terletak di jalur 20. Daya tampung sekolah yang terbatas menyebabkan tidak semua anak di kecamatan Muara Padang melanjutkan pendidikan ke SMA tersebut.

Sebenarnya di desa Air Gading sendiri terdapat satu SMK swasta jurusan akuntansi. Akan tetapi fasilitasnya masih jauh dari memadai dan gedungnya saja masih menumpang pada gedung madrasah. Selain itu, guru yang mengajar juga belum sesuai dengan standar

kualifikasi maupun kompetensi karena latar belakang pendidikan mereka tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan.

Kabupaten OKU Selatan

APK SLTA

Hasil studi dokumentasi di kantor Biro Pusat Statistik (BPS) Kabupaten OKU Selatan pada tanggal 23 April 2013, diketahui bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTA Kabupaten OKU Selatan adalah 81,41⁽¹¹⁾. Namun data ini meragukan karena sangat jauh lebih besar dibandingkan dengan Angka Partisipasi

Murni (APM) maupun Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak usia 16-18 tahun yaitu masing-masing sebesar 48,01 dan 59,50. Selain itu, data BPS pada tahun 2010 menunjukkan bahwa OKU Selatan termasuk salah satu dari 8 (delapan) Kota/Kabupaten yang memiliki APK SLTA dibawah APK propinsi dan menempati APK SLTA terendah kedua setelah Musi Rawas, di mana APK SLTA Kabupaten OKU Selatan adalah 37,74% sedangkan Musi Rawas adalah 35,73%. Gambaran selengkapnya tentang hal ini dapat dilihat pada tabel 2 dan 3.

Tabel 2.
Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)
di Kabupaten OKU Selatan

Angka Partisipasi Sekolah	APM	APK
SD/MI	91,29	115,20
SMP/MTs	71,41	91,06
SMA/MA	48,01	81,41

Sumber: BPS OKU Selatan, 2012

Tabel 3.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten OKU Selatan

Angka Partisipasi Sekolah	2009	2010	2011
7 – 12	97,81	97,68	97,10
13 – 15	77,04	87,12	93,12
16 - 18	50,10	51,69	59,50

Sumber: BPS OKU Selatan, 2012

Jika dihitung berdasarkan data BPS Tahun 2012, jumlah siswa SLTA di Kabupaten OKU Selatan adalah sebanyak 9.134 orang, sedangkan jumlah anak usia 16-18 tahun adalah

sebanyak 14.793 orang. Maka dapat dihitung bahwa $9.135 : 14.793 \times 100 = 61,75$. Dengan demikian, APK SLTA Kabupaten OKU Selatan adalah 61,75%.

Seperti halnya di Kota Palembang maupun Kabupaten Banyuasin, tidak diketahui secara pasti APK SLTA setiap kecamatan di Kabupaten OKU Selatan. Namun berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten OKU Selatan, salah satu kecamatan yang jumlah anak tidak melanjutkan ke SLTA cukup banyak adalah kecamatan Buay Pemaca. Karena itu penelitian ini difokuskan pada kecamatan Buay Pemaca. Topografi kecamatan Buay Pemaca sebagian besar merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan lahan antara 15 – 25 derajat. Kondisi ini secara tidak langsung menyebabkan adanya beberapa titik lokasi yang susah untuk dijangkau dengan sarana transportasi.

Profil Orang Tua dari Anak yang Tidak Melanjutkan ke SLTA

Sebagian besar orang tua yang memiliki anak tidak melanjutkan ke SLTA di kecamatan Buay Pemaca tidak dapat dikatakan berasal dari kalangan masyarakat miskin. Hal ini dapat dilihat dari kondisi tempat tinggal dan pekerjaan mereka. Rumah mereka kebanyakan adalah rumah permanen dilengkapi dengan antena parabola. Selain itu, mereka juga rata-rata adalah

petani dengan lahan sendiri. Namun demikian, tatkala ditanya alasan anak mereka tidak melanjutkan ke SLTA adalah karena faktor kemiskinan.

Ketika ditelusuri lebih lanjut melalui wawancara dengan pejabat Dinas Pendidikan dan FGD dengan beberapa kepala SLTP, kemiskinan tersebut lebih disebabkan penghasilan penduduk yang bersifat tahunan. Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa mayoritas penduduk OKU Selatan (83,48%) bekerja di bidang pertanian khususnya perkebunan rakyat dengan komoditi utama kopi. Sebagaimana dimaklumi bahwa perkebunan kopi hanya dapat dipanen satu tahun sekali. Seandainya mereka dapat mengatur penghasilan yang diperoleh dengan manajemen yang baik sesungguhnya penghasilan tersebut sudah lebih dari cukup. Tetapi yang terjadi, sudah menjadi kebiasaan bagi sebagian penduduk asli untuk menghabiskan penghasilan yang diperoleh tersebut dalam waktu kurang dari 3 bulan dan kemudian mereka hidup dalam kondisi berkekurangan pada 9 bulan berikutnya. Salah seorang pejabat Dinas Pendidikan mengatakan : Sudah menjadi kebiasaan sebagian masyarakat asli sini jika setelah panen mereka membelanjakan uang mereka

untuk hal-hal yang tidak terlalu penting termasuk membeli barang-barang elektronik yang mewah tanpa memikirkan untuk menabung guna keperluan sehari-hari (termasuk pendidikan) sebelum tiba panen di tahun berikutnya. Seringkali dalam waktu kurang dari 3 bulan uang mereka telah habis. Sehingga tidak jarang saat setelah panen mereka mampu mendaftarkan anak mereka ke sekolah di kota sekalipun namun setelah 3 bulan berhenti dengan alasan tidak ada biaya.

Hal ini juga didukung dari hasil FGD dengan para kepala SLTP di Kecamatan Buay Pemaca bahwa kebiasaan masyarakat yang demikianlah sehingga menyebabkan ketidakmampuan membiayai pendidikan anak mereka hingga ke jenjang SLTA. Kondisi ini didukung pula oleh tingkat pendidikan mayoritas penduduk yang rendah. Data BPS Tahun 2012 menunjukkan bahwa sebanyak 55,37% penduduk OKU Selatan hanya berpendidikan SD ke bawah. Sementara yang SLTA ke atas hanya 17,19%. Tingkat pendidikan yang rendah berpengaruh pada kemampuan manajemen penghasilan yang kurang baik berakibat penduduk sulit melepaskan diri dari kemiskinan.

Tingkat pendidikan yang rendah juga menyebabkan orang tua kurang menyadari arti penting pendidikan bagi anak-anak mereka. Anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah lalu dimanfaatkan untuk membantu bekerja di kebun dengan pertimbangan mengurangi pengeluaran untuk membayar upah buruh. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa hampir semua anak yang tidak melanjutkan ke SLTA bekerja di perkebunan baik di kebun sendiri maupun sebagai buruh di kebun penduduk lain.

Profil Anak yang Tidak Melanjutkan ke SLTA

Sebagian besar anak yang tidak melanjutkan ke SLTA di Kabupaten OKU Selatan adalah berasal dari keluarga miskin. Sebagai contoh Andi (bukan nama sebenarnya) yang berusia ±17 tahun. Tahun lalu Andi tidak melanjutkan ke SLTA dengan alasan keterbatasan ekonomi atau kemiskinan. Andi adalah anak kedua, kakaknya juga hanya tamat SMP. Selama satu tahun ini Andi membantu orang tuanya bekerja di kebun kopi milik keluarga mereka sendiri. Aktivitas yang dilakukan seperti memetik atau menjemur kopi jika panen tiba. Orang tua Andi adalah penduduk asli yang

sangat menggantungkan hidup mereka dari perkebunan kopi yang mereka kelola sendiri. Namun dilihat dari kondisi rumah mereka cukup layak karena merupakan rumah permanen yang dilengkapi dengan antena parabola.

Seperti halnya Andi, seorang anak perempuan (sebut saja Ani berusia ± 18 tahun) tidak melanjutkan ke SLTA juga dengan alasan orang tuanya tidak mampu. Ani adalah anak bungsu dari 5 bersaudara, dan semua kakak-kakaknya juga tidak melanjutkan ke SLTA bahkan 2 diantaranya tidak tamat SD. Sudah 2 tahun Ani tidak bersekolah, namun selama itu pula dia tidak bekerja. Aktivitasnya sehari-hari hanya main-main dengan teman-temannya. Orang tuanya hanyalah buruh di perkebunan kopi milik orang lain sehingga tidak ada pekerjaan yang memungkinkan bagi Ani untuk membantu orang tuanya mengelola kebun milik sendiri. Menurut tetangganya, Ani tidak melanjutkan ke SLTA meski ada program sekolah gratis karena tidak mampu membeli buku dan Lembar Kerja Siswa (LKS) yang harganya tidak murah. Namun pada saat dilakukan wawancara dapat ditemui bahwa Ani memiliki *handphone*.

Hasil FGD dengan para tokoh dan masyarakat di desa Durian Sembilan Kecamatan Buay Pemaca, yang dihadiri juga oleh Sekcam Buay Pemaca, Kades Durian Sembilan, dan Kades Sri Menanti, menunjukkan bahwa memang hampir 90% anak-anak telah memiliki *handphone*. Kepemilikan *handphone* ini pada akhirnya berdampak pada semangat belajar yang menurun. Tidak jarang ditemui pada *handphone* mereka ada gambar atau video asusila. Menurut penduduk, kegandrungan pada *handphone* berdampak lebih lanjut pada pernikahan di usia muda.

Dua kasus di atas menunjukkan bahwa faktor kemiskinan menjadi penyebab utama anak tidak melanjutkan ke SLTA. Berdasarkan FGD yang dilakukan dengan pada kepala SMP di Kecamatan Buay Pemaca, memang sebagian besar anak tidak melanjutkan ke SLTA adalah karena kemiskinan. Namun ada juga anak-anak yang tidak melanjutkan ke SLTA karena faktor geografis seperti jarak rumah dengan sekolah dan sarana transportasi yang kurang memadai. Ada anak-anak yang harus menempuh jarak ke sekolah hingga 7 km dengan kondisi jalan yang rusak. Juga tidak jarang ditemui bagi anak-

anak yang tinggal jauh dari sekolah harus menyewa ojek yang dibayar saat panen tiba dengan ongkos $\pm 2-3$ juta rupiah. Data ini juga diperoleh dari FGD dengan para tokoh dan masyarakat di desa Durian Sembilan Kecamatan Buay Pemaca.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Talang Padang Kecamatan Buay Pemaca juga menunjukkan faktor ekonomi sebagai faktor utama anak tidak melanjutkan ke SLTA. Namun faktor ini juga berkaitan dengan daya tampung SLTA. Dikarenakan daya tampung yang terbatas menyebabkan sekolah melakukan seleksi masuk sehingga ada anak-anak yang terpaksa tidak diterima. Bagi siswa yang berasal dari keluarga dengan kemampuan ekonomi memadai, mereka dapat melanjutkan ke SLTA di Ibukota Kabupaten atau ke Palembang, namun bagi yang tidak mampu akan lebih memilih tidak bersekolah atau bekerja.

PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan-temuan penelitian yang dikemukakan di atas, dapat dinyatakan bahwa faktor penyebab rendahnya APK SLTA di Sumatera Selatan disebabkan oleh banyak faktor meliputi: faktor status

sosial ekonomi, faktor budaya, dan faktor geografis. Namun masing-masing kota/kabupaten menunjukkan penjelasan yang berbeda meski beberapa faktor penyebabnya sama.

Berkaitan dengan faktor penyebab belum maksimalnya pencapaian APK SLTA di Kota Palembang, berdasarkan hasil temuan penelitian khususnya di kecamatan Alang-alang Lebar menunjukkan bahwa faktor utama penyebab banyaknya anak-anak yang tidak melanjutkan ke SLTA adalah faktor status sosial ekonomi dan faktor budaya. Dilihat dari status sosial ekonomi orang tua, sebagian besar orang tua dari anak yang tidak melanjutkan ke SLTA berpendidikan rendah dan berasal dari keluarga miskin yang ditandai dengan tingkat pendidikan yang rendah dan pekerjaan yang tidak tetap seperti buruh bangunan dan pedagang kecil di pasar. Dilihat dari segi budaya, sebagian besar orang tua dari anak yang tidak melanjutkan ke SLTA memiliki kesadaran yang rendah akan arti penting pendidikan bagi masa depan anak-anak mereka. Orang tua cenderung kurang peduli pada pendidikan anak mereka dan kurang peduli apakah anaknya bersekolah atau tidak.

Selain kedua faktor tersebut, faktor lain yang besar juga pengaruhnya adalah faktor kemampuan anak, faktor daya tampung sekolah negeri, dan faktor lingkungan. Dilihat dari kemampuan anak, kemiskinan membuat para orang tua tidak mampu memberi asupan nutrisi yang memadai pada anak sehingga anak-anak tidak dapat mengembangkan potensi kecerdasannya secara optimal. Karena itu, sebagian anak yang tidak melanjutkan ke SLTA disebabkan merasa kurang mampu mengikuti pelajaran di SLTA yang dianggap “berat”. Selain itu, ketidakmampuan belajar juga disebabkan rendahnya motivasi akibat lingkungan yang tidak mendukung. Dilihat dari daya tampung sekolah negeri, dengan jumlah penduduk terbanyak ke-8 di kecamatan Alang-alang Lebar hanya terdapat satu sekolah negeri dengan daya tampung yang terbatas. Hal ini mengakibatkan banyak anak yang tidak dapat menikmati program sekolah gratis dari Pemerintah. Dilihat dari faktor lingkungan, lingkungan sosial yang buruk ditambah dengan kurangnya perhatian orang tua berdampak buruk pada pandangan anak-anak tentang cita-cita dan masa depan sehingga

lebih suka tidak bersekolah dan mudah sekali terjerumus pada narkoba.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa ada lima faktor yang menjadi penyebab APK bermasalah di Kota Palembang meliputi faktor status sosial ekonomi, faktor budaya, faktor kemampuan anak, faktor daya tampung sekolah negeri, dan faktor lingkungan. Namun pada setiap kasus yang ada penyebabnya tidaklah tunggal. Sebagai contoh, tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan orang memiliki kesadaran yang rendah akan arti penting pendidikan bagi masa depan anak-anak mereka. Rendahnya tingkat pendidikan ditambah lagi dengan penghasilan yang juga rendah berakibat pada ketidakmampuan memberikan gizi yang memadai sehingga anak-anak tidak mampu mengembangkan potensi kecerdasannya secara optimal, bersaing untuk dapat masuk ke sekolah negeri, serta membentengi diri dengan pengaruh lingkungan sosial yang negatif.

Berkaitan dengan faktor penyebab belum maksimalnya pencapaian APK SLTA di Kabupaten Banyuasin, berdasarkan hasil temuan penelitian khususnya di kecamatan Muara Padang menunjukkan bahwa faktor

utama penyebab banyaknya anak-anak yang tidak melanjutkan ke SLTA adalah faktor status sosial ekonomi dan faktor geografis. Dilihat dari status sosial ekonomi orang tua, sebagian besar orang tua dari anak yang tidak melanjutkan ke SLTA di kecamatan Muara Padang termasuk dalam kelompok sosial ekonomi menengah ke bawah. Hal ini terlihat dari tingkat pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan mereka. Sebagian besar orang tua hanya berpendidikan SD, bahkan sebagian ada yang tidak tamat SD dengan pekerjaan sebagai petani sawah dan kebun dengan penghasilan bergantung pada musim. Dilihat dari faktor geografis, satu-satunya SLTA negeri di kecamatan Muara Padang letaknya sangat jauh dan jalan menuju sekolah juga rusak berat. Karena itu, jika musim hujan para siswa lebih memilih untuk tidak bersekolah.

Selain kedua faktor tersebut, faktor lain yang turut menjadi penyebab tidak melanjutkan ke SLTA adalah faktor budaya, faktor lingkungan, dan faktor daya tampung sekolah negeri. Dilihat dari faktor budaya, tingkat pendidikan orang tua yang rendah menyebabkan rendahnya kesadaran mereka akan arti penting pendidikan, sehingga mereka tidak mampu

memotivasi anak-anak mereka untuk melanjutkan pendidikan. Dilihat dari faktor lingkungan, banyaknya anak-anak yang tidak melanjutkan ke SLTA membentuk suatu lingkungan yang kurang kondusif. Banyaknya anak perempuan di desa tersebut yang tidak melanjutkan ke SLTA memilih bekerja sebagai *baby sitter* di Palembang membuat anak perempuan lainnya terpengaruh untuk menempuh jalan yang sama. Begitupun dengan anak laki-laki, banyaknya mereka yang tidak melanjutkan namun dapat memperoleh penghasilan dari bekerja sebagai buruh perkebunan membuat anak laki-laki lainnya terpengaruh.

Dilihat dari daya tampung sekolah negeri, di kecamatan Muara Padang hanya ada satu SLTA negeri, yaitu SMAN Muara Padang. Namun SMA tersebut tidak mampu menampung semua lulusan SMP di kecamatan tersebut. Keterbatasan daya tampung SLTA negeri membuat tidak semua anak-anak dapat menikmati program sekolah gratis yang dilaksanakan Pemerintah. Meski di desa Air Gading terdapat SMK swasta, namun fasilitasnya masih jauh dari memadai dan guru yang mengajar juga belum sesuai dengan standar.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa ada banyak faktor yang menjadi penyebab banyaknya anak-anak di kecamatan Muara Padang, khususnya desa Air Gading, tidak dapat melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang SLTA. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor status sosial ekonomi, faktor geografis, faktor budaya, faktor lingkungan, dan faktor daya tampung sekolah negeri. Namun dalam setiap kasus tidak melanjutkan ke SLTA di desa ini bukan disebabkan oleh faktor tunggal. Misalnya, kondisi sosial ekonomi yang tergolong menengah ke bawah membuat rendahnya kesadaran orang tua akan arti penting pendidikan bagi anak-anak mereka, sementara rendahnya kesadaran tersebut juga membuat orang tua tidak dapat membentengi anak-anak mereka dari pengaruh negatif dari lingkungan.

Berkaitan dengan faktor penyebab belum maksimalnya pencapaian APK SLTA di Kabupaten OKU Selatan, berdasarkan hasil temuan penelitian khususnya di kecamatan Buay Pemaca menunjukkan bahwa faktor utama penyebab banyaknya anak-anak tidak melanjutkan ke SLTA adalah faktor status sosial ekonomi dan faktor budaya. Dilihat dari status sosial

ekonomi, mayoritas penduduk berpendidikan rendah kurang menyadari arti penting pendidikan bagi anak-anak mereka. Anak-anak sering dimanfaatkan untuk membantu bekerja di kebun dengan pertimbangan mengurangi pengeluaran untuk membayar upah buruh. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa hampir semua anak yang tidak melanjutkan ke SLTA bekerja di perkebunan baik di kebun sendiri maupun sebagai buruh di kebun penduduk lain.

Dari faktor budaya, sebagian besar orang tua yang memiliki anak tidak melanjutkan ke SLTA di kecamatan Buay Pemaca adalah penduduk asli yang sangat menggantungkan hidup mereka dari perkebunan kopi dengan penghasilan tahunan. Penduduk asli memiliki kebiasaan secara turun temurun untuk menghabiskan penghasilan yang diperoleh dalam waktu kurang dari 3 bulan dan kemudian mereka hidup dalam kondisi berkekurangan pada 9 bulan berikutnya. Kebiasaan tersebut semakin berkembang subur dalam masyarakat karena tingkat pendidikan mayoritas penduduk yang rendah. Hasil FGD dengan para kepala SLTP di Kecamatan Buay Pemaca dan wawancara dengan salah seorang

pejabat di Dinas Pendidikan menunjukkan bahwa kebiasaan tersebut berakibat pada ketidakmampuan masyarakat membiayai pendidikan anak mereka hingga tamat. Sehingga tidak jarang ditemui banyak siswa yang masuk sekolah sesaat setelah panen dan berhenti 3 hingga 5 bulan kemudian dengan alasan tidak ada biaya.

Selain kedua faktor tersebut, faktor lain yang turut menjadi penyebab tidak melanjutkan ke SLTA adalah faktor daya tampung sekolah, faktor geografis, dan faktor lingkungan. Dilihat dari daya tampung sekolah, data Dinas Pendidikan dan BPS tahun 2012 menunjukkan bahwa daya tampung SLTA di Kabupaten OKU Selatan sebesar 7.304 peserta didik, sementara lulusan SMP/MTs sebanyak 15.825 peserta didik, sehingga hanya 46,15% lulusan SMP/MTs yang dapat ditampung di SLTA. Daya tampung yang terbatas menyebabkan SLTA melakukan seleksi masuk sehingga ada anak-anak yang terpaksa tidak diterima. Bagi siswa yang berasal dari keluarga dengan kemampuan ekonomi memadai, mereka dapat melanjutkan ke SLTA di Baturaja atau ke Palembang, namun bagi yang tidak

mampu akan lebih memilih tidak bersekolah atau bekerja.

Dilihat dari faktor geografis, ada juga anak-anak yang tidak melanjutkan ke SLTA karena jauhnya jarak rumah dengan sekolah dan sarana transportasi yang kurang memadai. Ada anak-anak yang harus menempuh jarak ke sekolah hingga 7 km dengan kondisi jalan yang rusak. Juga tidak jarang ditemui bagi anak-anak yang tinggal jauh dari sekolah harus menyewa ojek yang dibayar saat panen tiba dengan ongkos dua hingga tiga juta rupiah. Data ini juga didukung oleh hasil FGD dengan para tokoh dan masyarakat di desa Durian Sembilan Kecamatan Buay Pemaca.

Dilihat dari faktor lingkungan, hampir 90% anak-anak telah memiliki *handphone*. Hasil FGD dengan para tokoh dan masyarakat di desa Durian Sembilan Kecamatan Buay Pemaca diperoleh data bahwa kepemilikan *handphone* ini pada akhirnya berdampak pada semangat belajar yang menurun. Menurut penduduk, kegandrungan pada *handphone* berdampak lebih lanjut pada pernikahan di usia muda dan tidak melanjutkan ke SLTA.

Berdasarkan uraian di atas, nampaklah bahwa ada banyak faktor

yang menjadi penyebab banyaknya anak-anak di Kabupaten OKU Selatan, khususnya kecamatan Buay Pemaca, yang tidak melanjutkan ke SLTA. Namun seperti halnya di Kota Palembang maupun Kabupaten Banyuasin, dalam setiap kasus tidak melanjutkan ke SLTA di Kabupaten OKU Selatan bukan disebabkan oleh faktor tunggal, akan tetapi dapat disebabkan oleh dua atau tiga faktor sekaligus.

Dari pembahasan terhadap faktor penyebab tidak melanjutkan ke SLTA yang diuraikan di atas, maka dapat dikatakan bahwa penyebab utama masalah belum maksimalnya pencapaian APK SLTA di tiga Kota/Kabupaten yang ada di Sumatera Selatan adalah faktor status sosial ekonomi, baik dilihat dari tingkat pendidikan, pekerjaan, maupun penghasilan orang tua. Bila dikaitkan dengan kondisi kemiskinan masyarakat sumsel sendiri, data BPS tahun 2012 menunjukkan bahwa memang jumlah penduduk miskin di sumsel cukup signifikan. Hingga bulan maret 2011 penduduk miskin di sumsel mencapai 1.074.807 atau 14,24%. Patut diduga bahwa tingginya jumlah penduduk miskin berakibat pada masalah APK SLTA. Hal ini sejalan dengan apa yang

diungkapkan oleh Michael P. Todaro yang menyatakan bahwa diantara faktor penyebab rendahnya APK SLTA adalah tingginya biaya yang dibebankan pada orang tua.

Namun kemiskinan bukanlah satu-satunya faktor karena ada faktor-faktor lain yang saling berkaitan. Beberapa faktor bahkan muncul di semua lokasi, baik di perkotaan maupun pedesaan, yaitu faktor budaya, daya tampung sekolah negeri, dan lingkungan. Namun, meski ketiga faktor ini sama-sama menjadi penyebab masalah APK SLTA di semua lokasi penelitian, hal yang mempengaruhinya berbeda-beda.

Dari segi budaya, rendahnya kesadaran orang tua akan arti penting pendidikan bagi masa depan anak-anak mereka di Kota Palembang dipengaruhi oleh faktor kemiskinan dan pandangan hidup materialisme masyarakat kota yang memandang posisi seseorang dalam masyarakat bukan ditentukan oleh tingkat pendidikan yang tinggi. Hal tersebutlah yang membuat orang tua tidak banyak berbuat tatkala anak-anak mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan ke SLTA. Di Kabupaten Banyuasin, rendahnya kesadaran akan arti penting pendidikan dipengaruhi oleh kemiskinan dan kondisi geografis yang

tidak mendukung sehingga membuat orang tua juga tidak berbuat banyak agar anak-anak mereka terus bersekolah tinggi. Faktor budaya yang cukup unik terlihat di Kabupaten OKU Selatan, di mana rendahnya kesadaran akan arti penting pendidikan dipengaruhi oleh kemiskinan yang diakibatkan kebiasaan masyarakat dalam pengelolaan keuangan yang kurang tepat.

Dari segi daya tampung sekolah, baik di Kota Palembang sebagai representasi wilayah perkotaan maupun di Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten OKU Selatan sebagai representasi wilayah pedesaan, semuanya menunjukkan kondisi daya tampung SLTA yang terbatas, terutama SLTA negeri. Agar proses belajar mengajar di SLTA berjalan dengan baik, idealnya SMA, SMK, maupun MA yang ada mampu menampung semua lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Namun, daya tampung SMA, SMK dan MA terbatas. Untuk mengatasi masalah ini, solusinya adalah dengan membangun ruang kelas baru, namun hal ini terkendala oleh keterbatasan dana. Pemerintah sebenarnya telah mencoba usaha lain untuk mengatasi masalah ini. Contohnya Kabupaten OKU Selatan,

menurut Kepala Dinas Pendidikan OKU Selatan diantara upaya lain yang dilakukan adalah dengan menjadikan sekolah swasta berstatus sekolah negeri. Dilihat dari kondisi dua tahun terakhir, upaya ini nampaknya cukup berhasil untuk meningkatkan APK SLTA di Kabupaten OKU Selatan.

Dari faktor lingkungan, meski masing-masing lokasi menunjukkan kondisi lingkungan sosial yang berbeda, namun faktor lingkungan menjadi penyebab rendahnya APK SLTA di semua lokasi. Di Kota Palembang, lingkungan sosial perkotaan yang sudah terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif seperti pergaulan bebas dan narkoba ditambah dengan kurangnya perhatian orang tua berdampak buruk pada pandangan anak-anak tentang cita-cita dan masa depan sehingga lebih suka tidak melanjutkan sekolah. Di Kabupaten Banyuasin, lingkungan sosial pedesaan yang kurang memotivasi ditambah dengan kemiskinan dan kondisi geografis yang tidak mendukung membuat anak-anak lebih memilih bekerja dengan penghasilan yang tidak seberapa ketimbang sekolah. Di Kabupaten OKU Selatan, penggunaan *handphone* yang memuat gambar atau video asusila oleh sebagian anak-anak

berdampak pada penurunan semangat belajar dan pernikahan di usia muda.

Selain ketiga faktor tersebut, ada faktor lain yang juga menjadi penyebab masalah APK SLTA namun hanya ada di sebagian lokasi, yaitu faktor geografis dan faktor kemampuan anak. Faktor geografis menjadi penyebab masalah APK SLTA hanya di lingkungan pedesaan, terutama pada desa-desa yang terletak jauh dari SLTA. Kondisi ini diperburuk oleh kondisi jalan yang rusak berat dan tidak adanya sarana transportasi umum.

Di Kabupaten Banyuasin kondisi ini sebenarnya dapat diatasi dengan jalan mengeluarkan biaya tambahan untuk kos dan biaya makan setiap bulannya, sedang di Kabupaten OKU Selatan dapat diatasi dengan langganan ojek yang dibayar jika sudah panen. Namun jalan tersebut hanya bisa ditempuh oleh masyarakat yang mampu. Bagi masyarakat yang tidak mampu tidak mempunyai pilihan lain selain tidak menyekolahkan anak-anaknya hingga jenjang SLTA.

Faktor kemampuan anak sebagai penyebab masalah APK SLTA hanya terjadi di Kota Palembang. Rendahnya kemampuan anak yang ditandai dengan rendahnya kemampuan intelektual sebagai dampak dari asupan

nutrisi yang kurang memadai yang diakibatkan kemiskinan orang tua membuat anak-anak tidak dapat mengembangkan potensi kecerdasannya secara optimal. Karena itu, sebagian anak yang tidak melanjutkan ke SLTA disebabkan merasa kurang mampu mengikuti pelajaran di SLTA yang dianggap “berat”.

KESIMPULAN

Berdasar hasil penelitian ini dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Belum maksimalnya pencapaian APK SLTA di Sumatera Selatan yang direpresentasikan oleh Kota Palembang (wilayah perkotaan), Kabupaten Banyuasin (wilayah pedesaan pada dataran rendah), dan Kabupaten OKU Selatan (wilayah pedesaan pada dataran tinggi) disebabkan oleh banyak faktor yang berbeda-beda, meliputi faktor status sosial ekonomi, budaya, daya tampung sekolah, dan lingkungan.
2. Faktor status sosial ekonomi menjadi penyebab utama belum maksimalnya pencapaian APK SLTA, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Sebagian besar anak yang tidak melanjutkan ke

SLTA memiliki orang tua dengan tingkat pendidikan yang rendah, pekerjaan yang tidak tetap, dan penghasilan yang juga rendah. Kondisi status sosial ekonomi berpengaruh pula pada faktor-faktor lain, seperti rendahnya kesadaran akan arti pendidikan, rendahnya aksesabilitas ke sekolah, dan rendahnya kemampuan anak dalam mengikuti pelajaran.

3. Faktor lain yang juga menjadi penyebab belum maksimalnya pencapaian APK SLTA namun hanya ada di sebagian lokasi adalah faktor geografis dan kemampuan anak. Faktor geografis meliputi jauhnya jarak sekolah, kondisi jalan yang rusak berat, dan tidak adanya sarana transportasi umum. Faktor kemampuan anak yang ditandai dengan rendahnya kemampuan intelektual sebagai dampak dari asupan nutrisi yang kurang memadai yang diakibatkan kemiskinan membuat anak merasa kurang mampu mengikuti pelajaran di SLTA yang dianggap “berat”.

1. Karena belum maksimalnya pencapaian APK SLTA bukan semata-mata disebabkan faktor kemiskinan, Pemerintah hendaknya juga melakukan kebijakan lain yang berkaitan dengan faktor budaya, daya tampung sekolah, lingkungan, geografis, dan kemampuan anak.
2. Karena kesadaran masyarakat akan arti penting pendidikan terkesan masih rendah, hendaknya Pemerintah membuat kebijakan yang lebih tegas sehingga tidak ada anak-anak yang tidak bersekolah hingga jenjang SLTA dan dipekerjakan untuk tujuan memenuhi kebutuhan keluarga.
3. Karena daya tampung sekolah negeri yang ada masih terbatas, jarak sekolah yang relatif jauh, sarana jalan yang rusak berat, dan tidak adanya transportasi umum, maka Pemerintah hendaknya mendirikan SLTA baru yang dapat diakses oleh masyarakat atau menyediakan sarana transportasi umum yang dibutuhkan serta jalan yang rusak segera diperbaiki.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran kebijakan yang dapat disampaikan adalah:

DAFTAR PUSTAKA

1. Biro Pusat Statistik. Indikator Pendidikan 1994-2012, (internet) 2013. (diakses tanggal 2 Mei 2013) dalam http://www.bps.go.id/tab_sub/

- view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek= 28.
2. Biro Pusat Statistik. Sumsel dalam Angka 2010. Palembang: BPS Sumsel.
 3. Biro Pusat Statistik. Survei Sosial Ekonomi Nasional 2008. Jakarta: Biro Pusat Statistik.
 4. Akhmadi, dkk. Faktor-faktor Penyebab Rendahnya Angka Melanjutkan Sekolah. (internet) 2003. (diakses tanggal 2 Mei 2013) dalam www.smeru.or.id/report/research/education-ina.pdf.
 5. Todaro, Michael P. Economic Development, Seventh Edition, Ney York University: Addison Mesley, 2000.
 6. Biro Pusat Statistik. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi. (internet) 2012. (diakses tanggal 2 Mei 2013) dalam http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&id_subyek=23¬ab=1.
 7. Biro Pusat Statistik. Statistik Daerah Kota Palembang 2012. Palembang: Biro Pusat Statistik Kota Palembang.
 8. Disdikpora Kota Palembang. Data Pokok Pendidikan Kota Palembang 2013. Palembang: Disdikpora Kota Palembang.
 9. Biro Pusat Statistik. Statistik Daerah Kota Palembang 2012. Palembang: Biro Pusat Statistik Kota Palembang.
 10. Biro Pusat Statistik. Banyuasin dalam Angka 2012. Pangkalan Balai: Biro Pusat Statistik Kabupaten Banyuasin.
 11. Biro Pusat Statistik. OKU Selatan dalam Angka 2012. Muara Dua: Biro Pusat Statistik Kabupaten OKU Selatan.